

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional di era kontemporer saat ini ditandai dengan adanya kompleksitas yang semakin meningkat. Salah satunya yaitu perang. Perang ini merupakan isu yang mempengaruhi dinamika global. Contohnya saat ini yaitu perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini menjadi dua negara yang dinilai memiliki kompleksitas yang tinggi hingga menjadi fokus perhatian dunia. Perang yang terjadi antar dua negara tersebut telah berlangsung sejak tahun 2013 dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Keberlanjutan perang tersebut berhasil membawa dampak yang signifikan terhadap geopolitik regional dan hubungan internasional.

Rusia dan Ukraina merupakan negara yang pernah berada dalam satu kesatuan negara adikuasa yaitu Uni Soviet. Setelah kedua negara tersebut mendapatkan kemerdekaan, kedua negara itu sering terlibat dalam berbagai konflik, diantaranya konflik Sevastopol, Armada Laut Hitam dan Krimea. Bertahun-tahun ketegangan terjadi, Rusia dan Ukraina memutuskan untuk memperkuat ikatan lemah antara kedua negara dan mengesampingkan konflik yang ada. Hubungan diplomatik yang ditandai dengan *Treaty on Friendship, Cooperation, and Partnership between Ukraine and the Russian Federation* oleh Presiden Ukraina, Leonid Kuchma dan mitranya Rusia, Boris Yeltsin pada tanggal 31 Mei 1997. Semenjak disahkan perjanjian persahabatan, hubungan antara Rusia dan Ukraina ini tidak sepenuhnya berjalan baik melainkan masih dipenuhi dengan ketegangan.

Pada November 2013 menjadi awal mula kembali terjadinya perang, Ukraina mengalami krisis. Presiden Ukraina, Victor Yarukovich menolak untuk menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa dan memilih untuk menerima bantuan dari Rusia berupa pinjaman sebesar 15 miliar dollar AS dan potongan harga gas dari Rusia sebesar 30 persen. Keputusan yang diambil oleh Presiden Yarukovich tersebut kemudian menuai protes dari masyarakat Ukraina yang pro Barat dan adanya protes tersebut berangsur di Kiev hingga sampai pada tahun 2014. Seiring berjalannya waktu, aksi ini berubah menjadi sebuah aksi protes hingga terjadinya kekerasan dan menyebabkan puluhan dari demonstran terbunuh dan ratusan lainnya mengalami dampak yang cukup signifikan. Dari adanya hal tersebut akhirnya berbagai upaya mediasi dilakukan dan kesepakatan pembagian daerah

kekuasaan pemerintah Ukraina ini melibatkan beberapa mediator yang terlibat dari negara-negara yang ada di Eropa, antara lain Menteri Luar Negeri Prancis, Jerman, serta Polandia. Namun dari adanya upaya tersebut juga belum meleraikan permasalahannya karena Presiden Yarukovich menghilang dari Kiev dan resmi turun jabatan sementara lain, diganti sementara oleh Presiden Olexander Turchnyov. Namun pada tahun 2015 diganti lagi oleh Presiden Petro Poroshenko yang kemudian membentuk pemerintahan baru untuk Ukraina yang pro dengan Uni Eropa. Bergantinya politik dari Ukraina ini membuat Rusia semakin agresif kepada Ukraina, karena usahanya untuk mendominasi Ukraina tidak berhasil. Selain itu, permasalahan dari Krisis Ukraina yang terkait dengan masalah status Krimea juga berdampak pada sanksi ekonomi bagi Rusia. Sanksi ekonomi tersebut dijatuhkan oleh Amerika dan Eropa yang dimana Rusia dilarang untuk mengirim produk pertanian dan perikanan, seperti buah-buahan, daging, susu, ikan dan berbagai produk olahan lainnya, investasi, pariwisata, transportasi, energi, migas bahkan sumber daya mineral.

Di tahun 2014, Rusia melakukan aksi aneksasi di Semenanjung Krimea. Krimea merupakan wilayah dari Ukraina yang terdiri dari Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol. Akibat dari aneksasi yang dilakukan secara de facto di Semenanjung Krimea tersebut, Pemerintahan Federasi Rusia telah berhasil menjadi pemilik kekuasaan Krimea meskipun belum diakui oleh PBB (Kuzio, 2018). Aneksasi ini tidak diakui oleh mayoritas negara di dunia dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina.

Pada tanggal 26 Februari 2014, pasukan pro-Rusia mulai mengambil alih kendali di semenanjung Krimea, yang diduga terdiri dari personel militer Rusia. Mereka menyerbu gedung parlemen Krimea, di mana anggota parlemen Krimea melakukan pemungutan suara untuk menggulingkan pemerintah Krimea, mengganti perdana menteri, dan mengusulkan referendum mengenai otonomi Krimea. Pada tanggal 16 Maret 2014, sebuah referendum diselenggarakan untuk menentukan apakah Krimea akan bergabung dengan Federasi Rusia. Data dengan hasil mendukung bergabung sebesar 96,77% di Krimea dan 95,6% di Sevastopol. Hasil referendum ini menimbulkan kontroversi dan ditentang oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, Ukraina, serta warga Tatar Krimea, yang melihatnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Pada tanggal 17 Maret 2014, parlemen Krimea menyatakan kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan memutuskan untuk bergabung dengan Federasi Rusia. Pada tanggal 18 Maret 2014, Rusia dan Krimea menandatangani perjanjian penggabungan Republik

Crimea dan Sevastopol ke dalam Federasi Rusia. Namun, tindakan ini mendapat penolakan di tingkat internasional. Pada tanggal 27 Maret 2014, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 68/262 yang menyatakan bahwa referendum di Crimea tidak sah dan penggabungan Crimea ke Rusia adalah tindakan ilegal. Pada tanggal 15 April

2014, parlemen Ukraina menyatakan Crimea sebagai wilayah yang telah dianeksasi oleh Rusia (Hopf, 2016).

Dengan berlanjutnya konflik ini hingga sampai saat ini, China memiliki peran penting dalam isu – isu internasional dikarenakan memiliki kekuatan dalam ekonomi global. Diketahui bahwa China menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. China adalah negara yang memiliki hubungan yang erat dengan Rusia, baik dalam hal ideologi yang serupa maupun kerjasama bilateral yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selain berkolaborasi dengan Rusia, China juga telah menginvestasikan sumber daya ke Ukraina, terutama dalam sektor infrastruktur, pertanian, dan teknologi militer (Syuryansyah & Berthanila, 2022). Syuryansyah & Berthanila (2022) menambahkan bahwa China juga bersikap netral dalam pemungutan suara di Sidang Darurat PBB mengenai konflik Rusia-Ukraina. Sikap China tersebut disebut dengan “Balanced Approach” yang mencerminkan upaya China untuk menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak dan berusaha untuk menghindari keterlibatan langsung dalam konflik tersebut.

Sikap “Balanced Approach” ini merupakan pendekatan seimbang dalam mengambil keputusan atau sikap terhadap suatu masalah atau konflik. Disini sikap balanced-approach yang dilakukan China terhadap konflik Rusia-Ukraina dapat dilihat melalui keterlibatan ekonomi yang dilakukan. China memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan kedua negara, Rusia dan Ukraina. China adalah mitra perdagangan utama bagi keduanya, dan memiliki investasi signifikan di Ukraina, terutama dalam sektor infrastruktur dan teknologi. Oleh karena itu, China memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga hubungan baik dengan kedua negara. Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, China juga mencoba untuk mempertahankan posisi netral dalam pemungutan suara terkait konflik Rusia-Ukraina. Ini mencerminkan upaya China untuk tidak secara eksplisit mendukung satu pihak atas yang lain, seiring dengan prinsip diplomasi China yang cenderung berpegang pada non-intervensi. China memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas di wilayah Asia dan Eropa Timur. Konflik yang meluas antara Rusia dan Ukraina memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas regional, yang tidak diinginkan oleh China (Aisyah & Permanasari, 2021).

Oleh karena itu, China mungkin berusaha untuk memainkan peran mediasi atau mendorong dialog untuk mengakhiri konflik tersebut.

Hubungan antara China dan Rusia ini sebelumnya memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, yang terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Sebelum menjadi dekat seperti sekarang, hubungan antara China dan Rusia ini telah melalui serangkaian peristiwa dan perubahan yang mencerminkan dinamika geopolitik dan kepentingan nasional masing-masing. Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, hubungan antara Tiongkok dan Uni Soviet semula erat karena keduanya saling menganut ideologi komunis. Dalam tahun-tahun awal ini, kerja sama militer dan ekonomi antara Tiongkok dan Uni Soviet menguat, mencapai puncaknya pada awal 1950-an dengan penandatanganan Perjanjian Pertahanan dan Bantuan Saling-Menyaling (1950). Akan tetapi, hubungan ini memburuk pada pertengahan 1950-an karena perbedaan pendapat ideologis dan ambisi geopolitik masing-masing negara. Puncaknya, hubungan Tiongkok-Uni Soviet menjadi tegang pada awal 1960-an dan berlanjut hingga pertengahan 1980-an. Pada tahun 1969, konflik perbatasan di Pulau Damai memperburuk hubungan antara kedua negara ini. Selama Revolusi Kebudayaan dan kepemimpinan Mao Zedong, Tiongkok ini mengalami isolasi internasional dan ketidaksetujuan dengan Uni Soviet. Pada saat yang sama, Tiongkok mulai mempercepat kebijakan Reformasi dan Pembukaan di bawah Deng Xiaoping pada akhir 1970-an. Hal ini membuka Tiongkok untuk berinteraksi lebih luas dengan dunia luar, termasuk dengan negara-negara Barat. Rusia, setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, menghadapi perubahan drastis dalam politik dan ekonomi. Proses transformasi ini memberikan peluang baru untuk mengkonsolidasikan hubungan dengan Tiongkok. Hubungan antara Tiongkok dan Rusia ini akhirnya normal kembali dimulai pada akhir 1980-an dan mencapai puncaknya pada pertengahan 1990-an. Pada tahun 1996, kedua negara ini menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Strategis, menandai titik balik dalam hubungan bilateral mereka. Perjanjian ini memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan militer antara China dan Rusia. Selama periode ini, kerjasama ekonomi antara China dan Rusia mulai berkembang, dan pertukaran energi, teknologi, dan keamanan meningkat. Pada awal abad ke-21, kemitraan strategis semakin menguat dan diresmikan pada tahun 2001, menandai perubahan mendasar dalam hubungan bilateral. Sejak awal abad ke-21, hubungan China dan Rusia ini mengalami peningkatan signifikan dalam berbagai bidang. Keduanya mengejar kemitraan ekonomi yang lebih erat, terutama dalam sektor energi,

dengan proyek-proyek seperti saluran gas alam Siberia. Pertumbuhan hubungan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor global, termasuk ketidakpastian politik di Eropa dan Amerika Serikat, serta persamaan kepentingan dalam isu-isu global seperti perubahan iklim dan keamanan regional. Sementara ada ketegangan yang muncul, seperti isu perbatasan, China dan Rusia terus memperkuat koordinasi mereka di tingkat internasional, termasuk di forum-forum seperti BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan).

China sebagai kekuatan besar di dunia, memiliki peran penting dalam menentukan perkembangan konflik Rusia-Ukraina. Sikap China terhadap Rusia dalam isu perang Rusia-Ukraina telah mencuri perhatian dari para pengamat dan analisis internasional. China dipandang dengan pendekatan yang tampak seimbang (balanced-approach) dalam konflik ini, yaitu berusaha menjaga hubungan baik dengan Rusia dan Ukraina, disisi lain menghindari keterlibatan secara langsung dalam konflik tersebut. Dari adanya sikap dari China, faktor apa yang menjadi penentu sikap "balanced-approach" China terhadap Rusia dalam konteks perang Rusia-Ukraina? Apakah faktor-faktor ini berakar pada pertimbangan ekonomi, politik, keamanan, atau faktor-faktor lain yang lebih kompleks? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendasari sikap China terhadap Rusia dalam isu perang Rusia-Ukraina.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Mengapa China mengambil sikap balanced-approach perang Rusia- Ukraina, sedangkan hubungan bilateral dengan Rusia tergolong cukup dekat?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penentu sikap balanced-approach China terhadap Rusia dalam isu perang Rusia - Ukraina. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan

mempengaruhi sikap China dalam konteks konflik tersebut. Menganalisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi sikap balanced-approach China terhadap Rusia. Memahami implikasi sikap China terhadap dinamika hubungan bilateral mereka selama periode konflik diantara Rusia dan Ukraina.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Penelitian ini memiliki manfaat yang sangat penting dalam dinamika geopolitik saat ini. Pertama, perang Rusia - Ukraina merupakan salah satu konflik terpenting dalam politik global yang memiliki dampak regional dan internasionalnya yang luas. Kedua, memberi pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap China dapat memberikan wawasan yang berharga dan analisis kebijakan luar negeri China dan potensinya dalam mempengaruhi dinamika hubungan antar negara. Ketiga, hasil dari penelitian ini dapat memberikan panduan kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola hubungan mereka dengan China dalam konteks konflik regional serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sikap China terhadap Rusia dalam isu perang Rusia - Ukraina.